

Modal Sosial Gerakan Masyarakat Sipil di Kota Bukittinggi

Indriani Indriani¹, Eka Vidya Putra^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: ekavidyaputra@fis.unp.ac.id.

Abstrak

Tujuan penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis modal sosial apa yang dimiliki masyarakat sipil sehingga bisa bertahan. Maka Peneliti tertarik menganalisis terkait adanya gerakan masyarakat sipil yang menorehkan sejarah yaitu Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB), Aliansi Masyarakat Peduli Payakumbuh (AMPUH), Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) di Kota Bukittinggi yang bisa mengungkap kasus korupsi berjamaah di daerah Sumatera Barat. Diketahui dari tiga gerakan masyarakat sipil tersebut, gerakan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi yang terus menjalankan fungsinya sebagai peran kontrol masyarakat sipil terhadap pemerintahan. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori modal yang dikemukakan Pierre Bourdieu terkait modal sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif tipe studi kasus. Teknik pemilihan Informan Purposive Sampling dengan 10 Informan. Pengumpulan data yang Peneliti lakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yang telah didapatkan di lapangan, yaitu adanya dinamika gerakan masyarakat sipil dan keberlanjutan gerakan masyarakat sipil karena adanya modal sosial yang dimiliki masyarakat sipil di Kota Bukittinggi sehingga bisa bertahan yaitu Pertama adanya aktor yang mandiri dan otonom. Kedua jaringan yang dimiliki yaitu, jaringan dengan media, jaringan dengan basis massa, jaringan dengan pemerintahan, jaringan dengan organisasi sejenis, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Ketiga legitimasi masyarakat (kepercayaan dan nilai). Keempat isu lokalitas. Kelima organisasi masyarakat sipil.

Kata Kunci: Gerakan sosial; Masyarakat sipil; Modal sosial.

Abstract

The purpose of this study is focused on analyzing the social capital owned by civil society so that it can survive. So the researcher is interested in analyzing the existence of civil society movements that made history, namely the West Sumatra Care Forum (FPSB), the Payakumbuh Care Community Alliance (AMPUH), the Anti-Corruption People's Alliance (ARAK) in Bukittinggi City which can uncover cases of congregational corruption in the West Sumatra area. Under these three civil society movements, the community movement in Bukittinggi City continues to work as civil control staff over the government. The theory used to analyze this research is the theory of capital proposed by Pierre Bourdieu related to social capital. This research uses a case study type qualitative approach. Informant selection technique is purposive sampling with 10 informants. The data collected by the researcher was done by means of observation, interviews and documentation studies. The results of the research that have been obtained in the field, namely the dynamics of the civil society movement and the survival of the civil society movement because of the social capital owned by civil society in Bukittinggi City so that it can survive, namely: First, there are independent and autonomous actors. The two networks they have are, a network with the media, a network with a mass base, a network with the government, a network with similar organizations, such as Indonesia Corruption Watch (ICW), and thirdly, community legitimacy (beliefs and values). fourth issue locality. The five civil society organizations.

Keywords: Capital modal; Civil society movement; Social movement.

How to Cite: Indriani, I. & Putra, E.V. (2022). Modal Sosial Gerakan Masyarakat Sipil di Kota Bukittinggi. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 5(3), 353-363.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2022 by author.

Pendahuluan

Masyarakat sipil merupakan kumpulan dari masyarakat yang saling berinteraksi antara individu dengan individu, individu dan kelompok ataupun sebaliknya, bermanfaat sebagai penyeimbang perubahan yang diambil negara. Apabila masyarakat sipil merasakan perubahan yang tidak ideal, maka masyarakat akan meninjau perubahan itu kembali (Yusron, 2009). Adapun Ernest mengartikan masyarakat sipil sebagai masyarakat yang terbangun dari berbagai *Non Government Organization* (NGO) yang bersifat otonom, mandiri dan tangguh sebagai penetral kekuasaan negara. Mereka menentukan parameter kebenaran secara bersama-sama yang merujuk untuk tujuan bersama pula (Suryanto, 2018). Masyarakat sipil adalah sebuah konsep yang lebih spesifik daripada masyarakat. masyarakat sipil merujuk pada asosiasi warga negara yang terbentuk secara sukarela dalam jumlah yang amat besar seperti organisasi bisnis, organisasi media, rumah ibadah, lembaga-lembaga profesional, partai politik, kelompok penekan, dan perserikatan niaga (Faulks, 2018).

Peran masyarakat sipil yaitu melakukan kontrol sosial terhadap negara yang berkaitan dengan khalayak umum. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah berdasarkan demokrasi ataupun non demokrasi, ini akan membantu mereka dalam mengetahui dominasi kekuatan politik di Indonesia. Kekuatan politik yang diimpikan masyarakat sipil yaitu masyarakat sipil dan negara berjalan beriringan. Masyarakat sipil juga mengawal setiap aktivitas negara agar berjalan sesuai dengan demokrasi (Rex, 2021).

Tiga ciri utama masyarakat sipil yaitu, *Pertama* individu dan masyarakat yang memiliki kemandirian jika dihadapkan dengan negara. *Kedua* adanya ruang publik bebas yang menjadi wahana bagi warga negara untuk kepentingan publik. *Ketiga* adanya kemampuan yang dimiliki masyarakat sipil membatasi dominasi negara (Hikam, 1996). Masyarakat sipil dapat disimpulkan sebagai kumpulan dari individu-individu dan kelompok yang saling

Salah satu syarat dari demokrasi adalah munculnya masyarakat sipil yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran masyarakat sipil di Sumatera Barat yang ikut menjalankan proses demokrasi. Ragam pergerakan masyarakat sipil di Sumatera Barat dapat dilihat dari mengambil tiga kasus, Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB), Aliansi Masyarakat Peduli Payakumbuh (AMPUH) dan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) (Amri et al., 2016). LSM yang ada di Kota Padang, Payakumbuh, dan Bukittinggi ini menjadi wadah bagi masyarakat, namun diketahui pergerakan LSM yang ada di Kota Padang yang dikenal dengan FPSB bubar dan dianggap hal ini mengakibatkan kemunduran bagi masyarakat dalam menegakkan keadilan. LSM hadir sebagai kekuatan penyeimbang atas dominasi negara (Nunug, 2017). Begitu juga dengan AMPUH yang ada di Payakumbuh juga tidak aktif lagi. Hanya ARAK yang ada di Kota Bukittinggi sampai sekarang masih aktif.

ARAK merupakan organisasi masyarakat sipil yang hadir di Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi merupakan kota terbesar kedua setelah Kota Padang. Gerakan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi tidak hanya dilakukan ARAK tetapi juga muncul elemen-elemen lain seperti Aliansi Bukittinggi Peduli (ABP), Persatuan Pedagang Aur Kuning (PPAK). Gerakan masyarakat sipil tersebut dalam konteks mengontrol negara masih berlangsung sampai saat ini. Mulai dari kepemimpinan Djufri pada periode 2005-2010 dengan puncaknya pada kasus mantan Walikota ditahan karena modus penggelembungan dana pembelian tanah kantor DPRD Bukittinggi (Rinaldi & Kompas.com, 2012). Hingga kepemimpinan Wali Kota Erman Safar periode 2020-2025 diketahui adanya aksi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Bukittinggi Peduli (ABP) mempertanyakan janji Wali Kota Bukittinggi untuk mencabut Perwako 40 dan 41 Tahun 2018. Maka dalam konteks penelitian ini dilihat adanya gerakan masyarakat sipil yang terus bertahan.

Keberadaan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi ikut andil dalam melakukan kontrol terhadap Negara. Sehingga atas dasar itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modal sosial apa yang dimiliki masyarakat sipil di Kota Bukittinggi. Adapun beberapa penelitian yang membahas terkait gerakan masyarakat sipil yang ada di Sumatera Barat diantaranya *Pertama* penelitian (Amri et al., 2016) yang berjudul Pola Hubungan Negara dan *Civil Society Pattern State and Civil Society Relations* penelitian tersebut membahas tentang keberadaan masyarakat sipil dalam melakukan kontrol terhadap negara. *Kedua* penelitian yang dilakukan (Buyung, 2016) berjudul organisasi masyarakat sipil Sumatera Barat sebagai kekuatan politik dalam proses demokratisasi di Indonesia (studi kasus gugatan terhadap Undang-Undang No.17 Tahun 2013 membahas proses yang dilakukan organisasi kemasyarakatan dalam menggugat undang-undang yang dianggap merugikan, membatasi dan menekan organisasi kemasyarakatan. *Ketiga* penelitian (Herman, 2021) berjudul gerakan koalisi masyarakat sipil Sumatera Barat terhadap Penolakan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Berisikan adanya gerakan masyarakat sipil yang menjunjung *Zero Tolerance for Corruption* dalam mewujudkan demokrasi partisipasi dan akuntabilitas melalui beberapa kegiatan yang dilakukan seperti pendidikan politik rakyat, sekolah rakyat, forum warga, kelompok warga mengawal pelayanan publik, melakukan kampanye gerakan atau korupsi dan sekolah anti korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan, adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu, Perbedaannya yang terletak pada bagian pembahas bagaimana organisasi masyarakat sipil dapat menemukan kasus-kasus korupsi yang cukup menyentak mata masyarakat. Adapun perbedaan lainnya yaitu terletak pada fokus penelitian dimana Peneliti menekankan pada modal sosial. Penelitian ini menggunakan modal menurut Bourdieu modal sosial merujuk pada sumber daya yang memiliki kekuatan aktual dan berpotensi yang dimiliki seseorang. Seperti jaringan, norma dan sikap saling percaya yang berlangsung terus menerus dan diakui dan ada timbal balik berupa dukungan kolektif (Asquith, 2019).

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Fokus penelitian adalah menganalisis modal sosial yang dimiliki gerakan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Penelitian dilakukan secara mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dengan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasilnya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria tertentu yang sebelumnya telah ditentukan oleh Peneliti, yaitu masyarakat sipil yang berperan dalam gerakan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi. Informan pada penelitian ini tentunya memiliki informasi yang akan ditanyakan oleh Peneliti (Mukhsin et al., 2017).

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, dengan adanya observasi yang dilakukan di kedai kopi di dekat rumah sakit yarsi yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat sipil yang ada di Kota Bukittinggi untuk berdiskusi. Adapun lama waktu wawancara yang dilakukan Peneliti yaitu dari bulan April hingga Juli tahun 2022. Hasil penelitian dideskripsikan secara mendalam dan rinci berupa tulisan-tulisan, gambar dan bukan berupa angka-angka dari fenomena-fenomena yang ditemukan oleh Peneliti selama di lapangan sesuai kondisi yang alami (*natural setting*) berguna untuk membantu memecahkan masalah-masalah tersebut. Menarik untuk menganalisis modal sosial apa yang dimiliki masyarakat sipil di Kota Bukittinggi sehingga mampu mempertahankan gerakan sosial sehingga bertahan sampai sekarang ini.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, pemaparan terkait dengan temuan penelitian yang ditemukan Peneliti berupa deskripsi data yang diperoleh dalam pengumpulan data yang dilakukan Peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Diketahui gerakan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi dapat menjalankan perannya, sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah. Hal ini berjalan karena adanya modal sosial yang dimiliki masyarakat sipil di Kota Bukittinggi. Modal sosial tersebut sebagai berikut ini.

Dinamika Gerakan Masyarakat Sipil di Kota Bukittinggi

Gerakan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi mengalami dinamika di setiap tahunnya. Walaupun terjadinya pergantian kepemimpinan namun masyarakat sipil terus melakukan gerakan sosialnya. Masyarakat sipil menjalankan peran dan fungsinya yaitu, fungsi kontrol terhadap pemerintah. Diketahui setiap kepemimpinan adanya aksi-aksi yang terus bertahan sampai sekarang ini yang dilakukan masyarakat sipil. Berikut ini dinamika gerakan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi.

Tabel 1. Dinamika Gerakan Masyarakat Sipil di Kota Bukittinggi

No	Kepemimpinan	Isu	Bentuk Aksi	Aktor Organisasi Masyarakat Sipil
1.	Djufri (2005-2010)	Modus Penggelembungan dana pembelian lahan tanah kantor DPRD Bukittinggi	Konvensional	Aliansi Anti Korupsi (ARAK)
2.	Ismet Amziz (2010-2015)	Kasus bergulirnya dana hibah organisasi masyarakat (KNPI) pada tahun 2012	Konvensional	Laporan Masyarakat Sipil
3.	Ramlan (2015-2020)	Kasus Rumah Sakit Daerah	Konvensional	Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK)
		Pedestrian Jam Gadang	Konvensional	Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK)

	Proyek Pembangunan Kios Penampungan Pasar Atas (Lokasi Pasar Putih – Pasar Wisata)	Konvensional	Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK)
	Pemanfaatan Dana APBD (Dugaan Korupsi dan Kerugian Negara atau Daerah dalam Penyewaan 835 Unit Toko Pusat Pertokoan Pasar Putih Bukittinggi)	Konvensional	Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK)
	Menolak penggusuran oleh PT KAI (2017)	Non Konvensional	1. Aliansi Perjuangan Warga Stasiun (APWS) 2. OPAKAI (Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia)
	Tolak Kenaikan Retribusi, Pedagang Pasar Bawah datangi DPRD Bukittinggi	Non Konvensional	1. Pedagang Pasar Bawah 2. Ivan Haikel 3. LSM TIKAM 4. LIDIK KRIMSUS RI
	Pembaharuan kasus Pedestrian Jam Gadang	Konvensional	Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK)
	Pembaharuan Pengajuan kasus Rumah Sakit Daerah	Konvensional	Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK)
4.	Erman Safar (2020-2025) Aksi mempertanyakan janji wali kota Bukittinggi untuk mencabut Peraturan Walikota (Perwako) 40 dan 41 Tahun 2018 (2021)	Non Konvensional	1. Aliansi Bukittinggi Peduli 2. Persatuan Pedagang Pasar Aur Kuning (PPAK)

(Sumber: Olahan Data Peneliti)

Kebertahanan Masyarakat Sipil di Kota Bukittinggi

Kebertahanan masyarakat sipil yang ada di Kota Bukittinggi terlihat dengan adanya gerakan sosial yang terus ada. Gerakan masyarakat sipil yang ada di Kota Bukittinggi ini mampu mempertahankan gerakan mereka karena beberapa hal yaitu *Pertama* adanya aktor yang mandiri dan otonom. *Kedua* jaringan yang dimiliki yaitu, jaringan dengan media, jaringan dengan basis massa, jaringan dengan pemerintahan, jaringan dengan organisasi sejenis, seperti *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, *Ketiga* legitimasi masyarakat (kepercayaan dan nilai). *Keempat* isu lokalitas. *Kelima* organisasi masyarakat sipil. Hal ini tentunya didukung oleh beberapa faktor yaitu adanya modal sosial sebagai berikut ini.

Aktor yang Mandiri dan Otonom

Aktor yang mandiri disini dimaksudkan sebagai aktor yang ada di dalam masyarakat sipil yang mampu secara finansial tanpa bergantung pada orang lain ataupun organisasi lainnya. Diketahui dana yang diperlukan di setiap aktivitas sosial ini tentunya sangat membantu kegiatan agar berjalan dengan lancar, ketika adanya kegiatan yang direncanakan maupun tidak direncanakan maka untuk pendanaan didapat dari adanya dana dikumpulkan secara spontan maupun adanya patungan dari beberapa orang, dan bahkan kadang ada juga yang ingin berkontribusi memberikan dana pribadi. Hal ini seperti yang disampaikan Young Happy (60 tahun) Selaku Wakil Direktur ARAK mengatakan bahwa:

“...Dana untuk setiap adanya kegiatan yaitu dengan patungan dari setiap aktor-aktor yang membantu tersebut. Dana ini biasanya didapatkan dari kawan-kawan yang peduli. Tanpa modal pun ARAK tetap berjalan, karena setiap anggota di ARAK ikhlas untuk melakukan kegiatan ini. Dulu kami pernah ditawarkan bantuan dari APBD tetapi kami tidak mau, karena jika sudah dibantu APBD berarti kami tidak bisa lagi menyoroti kerjanya Pemerintah...” (Wawancara 21 Mei 2022).

Berkaitan dengan hal di atas ini ketika adanya kegiatan yang dilakukan oleh peserta kegiatan dapat berupa gerakan non parlementer (demonstrasi) dan pembuatan pengaduan ke pengadilan. Kegiatan ini pun didukung dari dana yang dikeluarkan dari kantong-kantong pribadinya menimbang ketika kegiatan tidak akan banyak dalam pemakaiannya. Kegiatan ini juga dinilai berdasarkan sukarela dari masing-masing peserta kegiatan yang ikut berpartisipasi. Hal ini berkaitan dengan pernyataan di atas juga disampaikan Aldian Riadi (49 tahun) Sebagai Ketua PPAK mengatakan bahwa:

“...Jika adanya aksi protes yang dilakukan persatuan pedagang terkait dengan dananya, dana masing-masing jika minum atau mau makan bayar sendiri-sendiri, karena kita pergi untuk aksi protes ini karena sukarela. Pedagang yang ikut untuk aksi protes dengan keikhlasan mereka datang ke kantor DPRD tersebut...” (Wawancara 13 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya, organisasi masyarakat sipil di Kota Bukittinggi berperan sebagai kontrol bagi pemerintahan. Ketika adanya kebijakan yang diambil pemerintah tidak sesuai maka masyarakat akan meninjau kembali kebijakan tersebut. Diketahui organisasi masyarakat sipil yang ada di Kota Bukittinggi seperti LSM ARAK, PPAK, ABP ketika melakukan kegiatan mereka akan melaksanakannya walaupun mengeluarkan dana dari kantong masing-masing. Setiap kegiatan yang dilakukan pun secara sukarela dengan harapan agar keadilan bagi masyarakat dapat dirasakan untuk kesejahteraan bersama.

Adapun aktor secara otonom yaitu, aktor yang ada di masyarakat sipil bisa secara individual mereka melakukan gerakan, tetapi kadang-kadang mereka mewakili secara bersama-sama melalui organisasi masyarakat sipil. Aktor masyarakat sipil yang ada di Kota Bukittinggi ada perbedaannya dengan daerah lain yaitu, masyarakat sipil disitu didorong oleh, akademis, contohnya di Padang ada FPSB. Sedangkan di Bukittinggi ditemukan aktor-aktor ini berasal dari, pedagang, politisi, wartawan, LSM, dokter. Mereka mandiri dalam melakukannya karena tidak akan ada yang mengintervensi mereka. Walaupun ada yang di partai politik namun dia bisa mempertahankan dirinya agar tidak diintervensi orang lain.

Jaringan

Gerakan yang dilakukan masyarakat sipil yang ada di Kota Bukittinggi terus bertahan dengan adanya hubungan-hubungan baik antara organisasi masyarakat sipil dengan sesama organisasi masyarakat sipil di Kota Bukittinggi dengan pedagang, pemerintah dan lembaga lainnya seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) sehingga mereka mendapatkan data-data pendukung dari beberapa hubungan-hubungan tersebut. Jaringan-jaringan yang terbentuk diantaranya yaitu;

Jaringan dengan Media

Adanya organisasi masyarakat sipil yang memiliki hubungan dengan media. Hal ini bermanfaat untuk masyarakat sipil menyampaikan kepada media agar hal ini dapat dilihat semua orang dan diketahui oleh pemerintahan yang mana organisasi masyarakat sipil menginginkan respon dari gerakan yang dilakukan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Rinaldo (61 Tahun) selaku Juru Bicara PPAK, mengatakan bahwa:

“...Ketika diskusi topiknya ini, maka kita buka tujuan yang kita capai terlebih dahulu. Jadi yang kita bicarakan sepakat dengan menyepakati, baru kita bicara tentang strategi dan proses dalam pencapaian, makanya ketika masih berjuang kita panggil media, ekspos di media, media-media online media-media apa gitu. Seperti media cetak supaya ingat di kepala semua orang. Teman-teman di mintak untuk ikut serta istilahnya mengviralkannya kalau bahasa sekarang sebab apa tanpa hal itu penyelenggara negara menganggap hal itu tidak ada...” (Wawancara 22 Mei 2022).



Gambar 1. Pedagang Pasar Aur Kuning adukan nasib mereka ke DPRD Sumbar

Keterkaitan hasil wawancara di atas dengan gambar yaitu, adanya usaha yang dilakukan PPAK untuk menyampaikan isu yang sedang mereka bahas kepada sesama anggota PPAK serta meminta anggotanya untuk mengviralkan isu tersebut dan media-media online agar gerakan yang mereka lakukan diketahui khalayak umum. Sebagaimana hal serupa juga disampaikan Ivan Haykel (41 Tahun) sebagai Ketua Aliansi Bukittinggi Peduli menyatakan bahwa,

“...Aliansi Bukittinggi Peduli perjuangannya sudah semenjak 2019, orangnya tetap sama pola pergerakannya sama, berjalan untuk merancang bagaimana efektivitas dan efisiensi perjuangan itu, jadi hal ini juga banyak disampaikan di berita terutama tentang saya dan Deny...” (Wawancara 20 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa adanya usaha yang dilakukan masyarakat sipil yang ada di Kota Bukittinggi agar banyaknya masyarakat yang mengetahui pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil ini. Ketua PPAK meminta anggota yang tergabung di dalam grup dapat memviralkan gerakan sosial yang sedang dilakukan secara bersama-sama baik dengan mengupload di Status WhatsApp, Status Facebook, ataupun mendatangkan awak media sebagai pencatat kronologi gerakan sosial yang telah mereka lakukan. Jaringan dengan media ini merupakan salah satu yang hal yang mendukung sehingga isu yang diangkat gerakan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi dikenal di berbagai kalangan.

Jaringan Basis Massa

Jaringan yang terjalin antara aktivis politik dengan para pedagang karena adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan setiap harinya sehingga mereka bergabung. Hubungan – hubungan terjalin terus-menerus yang akhirnya membentuk jaringan. Sebagaimana yang disampaikan Rinaldo (61 Tahun) mengatakan bahwa,

“...Terpilihnya saya sebagai penasihat saya praktek jadi diminta oleh pedagang jadi penasihat. kalau di grup kan disamping kita bercerita disana dan kita selalu mengadakan pertemuan sesama pengurus, sangat terencana terlebih dahulu...” (Wawancara 22 Mei 2022).

Sebagaimana hasil wawancara di atas diketahui adanya interaksi sosial yang terjalin setiap harinya mengakibatkan terbentuknya jaringan yang mendukung antara aktivis politik dan pedagang pasar. Aktivis politik yang Adapun hal serupa yang disampaikan Young Happy (60 Tahun) Sebagai Wakil Direktur ARAK mengatakan, bahwa;

“...Karena saya memang memiliki kedai juga di pasar atas sebelah ramayana dan bergabung di Paguyuban Pasar Atas, ketika ada hal yang ditemukan oleh pedagang mereka secara sukarela langsung menyampaikan hal tersebut kepada saya...” (Wawancara 21 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya jaringan sosial yang terbentuk karena adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh aktor masyarakat sipil di setiap harinya. Adapun dari aktivis politik tersebut merupakan salah seorang pedagang pasar yang memiliki keinginan untuk keadilan masyarakat. Adanya hubungan dengan pedagang pasar sehingga mereka mudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam proses untuk melakukan gerakannya. Dipertegas dengan adanya interaksi sosial yang terjalin antara aktivis politik dengan pedagang yang mendukung hubungan mereka.

Jaringan dengan Indonesia Corruption Watch (ICW)

Jaringan yang terjalin antara Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) dengan ICW yaitu, sebagaimana wawancara dengan Asraf Feri (58 Tahun) selaku Direktur Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) menyampaikan bahwa,

“...ICW kerjasamanya itu dalam program pelatihan, tahun 2007 ARAK itu yang ikut di dalam pelatihan terkait anti korupsi 1 kali, kalau ICW mengadakan program pemberdayaan kita juga diikuti, ada perwakilan 1 orang atau 2 orang jadi bukan kerjasama untuk melaporkan sebuah kasus gitu. ICW karena sudah berpengalaman diadakan se Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia. ICW mengajarkan cara membuat laporan. Pada 2018 sebelum corona, ketika ARAK terbentur dan tidak di follow up di Polda maka kami akan ke Jakarta membawa laporan ke KPK, ketika itulah kami ke ICW, kadang-kadang konsul saja...” (Wawancara 14 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa adanya hubungan baik yang terjalin antara ARAK dengan ICW yang mengakibatkan tersokongnya ARAK dalam proses pembuatan laporan yang sesuai dan jika ada hal yang ingin didiskusikan ARAK dengan ICW maka ARAK pergi ke kantor ICW. ICW merupakan lembaga yang telah besar pengaruhnya di Indonesia dan sangat membantu bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil yang fokus pada kasus korupsi.

Jaringan dengan Pemerintahan

Jaringan yang terjalin oleh aktivis-aktivis politik dengan pemerintah tentunya karena adanya hubungan yang baik, sebagaimana yang wawancara dengan Tasmon (63 Tahun) selaku Juru Bicara Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) menyatakan bahwa:

“...Cara mendapatkan data misalnya ada penyelewengan dan yang dilakukan. Kan ada yang dalam proyek itu namanya macam-macam, kontraktor, PPK, KPA, ada konsultan, konsultan ini dua ada swasta dan pemerintah. Swasta dibayar. Data-data ini dapat diminta kepada diantara mereka ini. Nah kalau kasus sudah ditemukan. Merelakan ada laporan-laporannya misalnya DPRD pergi ke proyek itu mempertanyakan. Hal-hal seperti ini yang dikumpulkan lalu di rekonstruksi lagi. Cara mendapatkan data-datanya yaitu berhubungan baik dengan orang yang memiliki dokumen-dokumen itu. Ketika kami ke lembaga Pemerintah kami punya teman-teman di dalamnya, tolong carikan surat ini, begitulah. Karena orang tau kita memanfaatkannya bukan untuk keuntungan pribadi atau kepentingan lembaga...” (Wawancara 28 Februari 2022)

Disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa adanya terjalin hubungan antara aktivis gerakan masyarakat sipil dengan Pemerintah yang akhirnya membantu dalam pengumpulan dokumen-dokumen penting sebagai penunjang. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori modal menurut Pierre Bourdieu adanya hubungan antara individu dengan individu lainnya akan dapat saling membantu. Adanya jaringan antara aktor-aktor dalam organisasi masyarakat sipil di Kota Bukittinggi dengan media, pedagang, ICW dan pemerintah akan mengakibatkan hubungan timbal balik diantara keduanya.

Legitimasi Masyarakat (kepercayaan dan nilai-nilai sosial)

Adanya pengakuan dari masyarakat terhadap keberadaan aktor-aktor masyarakat sipil di Kota Bukittinggi mengakibatkan munculnya kepercayaan dan nilai-nilai sosial sebagai pendukung dari modal sosial yang dimiliki gerakan masyarakat sipil tersebut. Hal ini dilihat dapat dilihat dengan munculnya hal berikut ini:

Kepercayaan

Organisasi masyarakat sipil ketika melakukan pergerakan tentunya dibutuhkan kepercayaan antara satu dan lainnya sehingga tidak ada nantinya yang akan menutupi data-data yang didapatkan oleh aktor organisasi masyarakat sipil. Kepercayaan bagi seorang aktor sebagai bentuk modal sosial yang sangat membantu mereka dalam menyampaikan setiap aspirasi yang disampaikan dari masyarakat, sehingga ketika ada masalah masyarakat akan dengan mudah menyampaikan masalahnya. Inilah yang membuat mereka menjadi lebih mudah untuk mengumpulkan data. Sebagaimana wawancara dengan Ivan Haykel (41 Tahun) Ketua ABP mengatakan bahwa:

“...Jadinya intinya apa, adanya pedagang memiliki kepercayaan, pedagang mana pedagang pasar bawah gitu. Pedagang pasar bawah datang kepada saya dan bang deny untuk menyampaikan aspirasi mereka...” (Wawancara 20 April 2022).

Adapun hal serupa disampaikan Tasmon (63 Tahun) Juru Bicara ARAK mengatakan bahwa:

“...Ketika ada sebuah Isu kami akan menanyakan berbagai informasi ke masyarakat agar mendapatkan informasi, dengan adanya kepercayaan mereka terhadap kami di organisasi masyarakat ini akan membuat kami lebih mudah mengumpulkan data...” (28 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas ini bahwasanya aktor yang ada di dalam organisasi masyarakat sipil telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat atas gerakan sosial yang pernah mereka lakukan. Sehingga terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat yang akhirnya mengakibatkan adanya kepercayaan dan nilai-nilai. Ketika menanyakan hal penting terkait isu yang akan dibahas masyarakat dengan mudah dan transparan dalam penyampaiannya pada aktor-aktor tersebut.

Nilai-nilai Sosial

Nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat dapat dijadikan pedoman dalam kehidupannya pun ditemukan dalam gerakan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut ini.

Nilai-nilai Solidaritas

Bagaimana organisasi masyarakat sipil di Kota Bukittinggi memiliki hubungan yang kuat antara satu dan lainnya. Hal ini disampaikan Bapak Ivan Haykel (41 Tahun) Ketua ABP beliau mengatakan bahwa:

“...Solidaritas itu perlu ditumbuhkan, kalau tidak ada solidaritas bagaimana cara kita bergerak dan berjuang melawan sebuah kebijakan yang dibuat. Ini adalah hal yang sulit. Namun kami punya ikatan solidaritas dan soliditas diantara pedagang, dan *insyaallah* kompak itu...” (Wawancara 20 April 2022).

Hal serupa juga disampaikan Bapak Aldian Riadi (49 Tahun) Wakil Ketua PPAK beliau mengatakan bahwa,

“...Kami pun sering berkumpul-kumpul dengan pedagang aur kuning agar terjalin silaturahmi. istilahnya memiliki kekompakan tidak ada yang saling mengucilkan...” (Wawancara 20 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas ini, diketahui bahwasanya hubungan yang dekat antara satu aktivis dengan aktivis lainnya mengakibatkan kedekatan. Adanya hubungan yang berjalan lancar mengakibatkan kuatnya hubungan di dalam masyarakat sipil tersebut. Aktivis yang melakukan gerakan masyarakat sipil ini memiliki tujuan dan kepentingan yang sama sehingga mereka disatukan dalam masyarakat sipil yang memiliki nilai kebersamaan.

Nilai-nilai Pantang Menyerah

Individu yang telah memilih untuk bergabung di dalam organisasi masyarakat maka tentu akan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi individu tersebut, menimbang banyaknya godaan di sepanjang jalan yang nantinya membuat keyakinan mereka goyah dan terbawa arus dari berbagai tantangan tersebut, bahkan juga bisa mengakibatkan individu tersebut tidak memiliki nyali lagi untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Sebagai seorang aktivis tentunya mereka akan menentukan arah kemana mereka akan melangkah dan mengambil keputusan. Sebagaimana wawancara pada tanggal yang disampaikan Bapak Asraf Feri Sabri (58 tahun) beliau mengatakan bahwa:

“...Tantangan kegiatan sosial ini tidaklah sederhana, kegiatan sosial apalagi, apalagi kegiatan-kegiatan LSM yang aktifnya. Kalau saya kan aktifnya di LSM Anti Korupsi itu tantangannya lebih sulit, lebih berat dan juga godaan tidak kecil. Orang-orang yang bisa bertahan dari godaan maka dia akan terus, maka jika orang yang tidak tahan godaan maka dia tidak akan lagi melakukan aktivitas sosial. Karena dia tidak lagi memiliki nyali untuk itu karena kredibilitasnya terganggu...” (Wawancara 19 Maret 2022).

Adanya semangat kebersamaan dalam mengerjakan sebuah kasus dan saling bertukar pikiran menjadi hubungan di dalam organisasi tersebut menjadi lebih erat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tasmon (63 tahun) Sebagai Juru Bicara ARAK terkait dengan adanya usaha dalam menghadapi tantangan beliau menyatakan bahwa:

“...Kebersamaan disini artinya namanya pengurus LSM Anti Korupsi disini tidak pernah mengerjakan secara individu jadi kami mengerjakan secara bersama...”. (Wawancara 28 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya, ketika organisasi masyarakat sipil dihadapkan dengan masalah yang memang cukup berat yaitu adanya tantangan bagi mereka jika diminta nantinya menjadi bagian dari pemerintahan. Hal ini tentunya membutuhkan penanganannya maka hal terpenting adalah orang-orang yang memang mampu untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan kasus tersebut. Jika mereka mendapatkan kasus maka hal ini didiskusikan secara bersama-sama.

Nilai Partisipatif

Organisasi masyarakat sipil yang ada di Kota Bukittinggi sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang aktif di antara organisasi masyarakat sipil yang ada di Sumatera Barat. Aktor juga berperan sebagai modal bagi keberlangsungan setiap aktor sebagai masyarakat sipil sampai sekarang ini. Diketahui adanya aktivitas sosial yang dilakukan biasanya dilakukan oleh orang yang sama. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Asraf Feri Sabri (58 tahun) mengatakan,

“...Aktor yang ada di berbagai kegiatan biasanya itu-itu saja. Aktor yang memang menyempatkan dirinya contohnya jika ada kasus terkait pedagang pasar atas, maka para pedagang yang memiliki rasa kebersamaan akan berpartisipasi dalam aksi tersebut...” (Wawancara 14 Juli 2022).

Adanya isu-isu baru yang perlu didiskusikan maka biasanya orang yang aktif dalam isu tersebut adalah orang yang memang sering ikut berpartisipasi dalam aktivitas sosial tersebut. Adapun hal serupa yang disampaikan wawancara pada Bapak Deny Satriadi (52 tahun) mengatakan,

“Aktor yang selalu berperan dalam setiap isu-isu baru itu akan sangat membantu untuk menegakkan keadilan, ketika adanya isu baru tersebut memang orang-orang yang memiliki kesadaran biasanya itu-itu saja saat adanya pelaksanaan diskusi tersebut...”. (Wawancara 22 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya ketika adanya kumpulan masyarakat sipil tentunya ada aktor-aktor yang secara sukarela bergabung di dalamnya dan bertahan di dalam masyarakat sipil tersebut. Nilai-nilai dan norma yang dapat diambil di dalamnya yang bisa dijadikan pedoman ataupun acuan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Isu Lokalitas

Tabel 2. Isu Lokalitas di Kota Bukittinggi

No	Kepemimpinan	Isu
1.	Djufri (2005-2010)	Modus Penggelembungan dana pembelian lahan tanah kantor DPRD Bukittinggi
2.	Ismet Amziz (2010-2015)	Kasus bergulirnya dana hibah organisasi masyarakat (KNPI) pada tahun 2012
3.	Ramlan (2015-2020)	Kasus Rumah Sakit Daerah
		Pedestrian Jam Gadang
		Proyek Pembangunan Kios Penampungan Pasar Atas (Lokasi Pasar Putih – Pasar Wisata)
		Pemanfaatan Dana APBD (Dugaan Korupsi dan Kerugian Negara atau Daerah dalam Penyewaan 835 Unit Toko Pusat Pertokoan Pasar Putih Bukittinggi)
4.	Erman Safar (2020-2025)	Menolak pengusuran oleh PT KAI (2017)
		Tolak Kenaikan Retribusi, Pedagang Pasar Bawah datangi DPRD Bukittinggi
		Pembaharuan kasus Pedestrian Jam Gadang
		Pembaharuan Pengajuan kasus Rumah Sakit Daerah
		Aksi mempertanyakan janji wali kota Bukittinggi untuk mencabut Peraturan Walikota (Perwako) 40 dan 41 Tahun 2018 (2021)

(Sumber: Olahan Data Peneliti)

*Organisasi Masyarakat Sipil***Tabel 3. Sumber daya elemen-elemennya masyarakat sipil**

No	Organisasi Masyarakat Sipil	Bersifat
1.	Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK)	Permanen
2.	Aliansi Bukittinggi Peduli (ABP)	Kontemporer
3.	Persatuan Pedagang Pasar Aur Kuning (PPAK)	Permanen

(Sumber: Olahan Data Peneliti)

Pembahasan

Berdasarkan pemaparan hasil temuan di atas, dapat dilihat bahwa keberthanan gerakan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi tidak terlepas dari modal sosial yang mereka miliki. Modal sosial berkaitan dengan hubungan-hubungan yang menjadi sumber daya dalam kedudukan sosial. Di dalamnya terdapat jaringan, kepercayaan dan nilai. Keberadaan modal sosial ini didukung dengan adanya beberapa faktor yaitu. *Pertama* Aktor otonom dan mandiri yang menjadi penjaga modal sosial tersebut. Selain itu keberadaan modal sosial tersebut didukung oleh kondisi geografis kota Bukittinggi yang relatif kecil dengan luas wilayah 25,24 km² dengan struktur demografinya yang rapat dan padat penduduk dengan jumlah 121,028 di tahun 2020.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bourdieu modal sosial merujuk pada sumber daya yang memiliki kekuatan aktual dan berpotensi yang dimiliki seseorang. Seperti jaringan, norma dan sikap saling percaya yang berlangsung terus menerus dan diakui dan ada timbal balik berupa dukungan kolektif (Asquith, 2019). Adapun modal sosial berkaitan dengan hubungan-hubungan yang menjadi sumber daya dalam kedudukan sosial (Ginting, 2019). Jaringan mendorong seseorang agar dapat saling berhubungan secara timbal balik antara individu dengan individu lainnya (Takwin, 2009). Modal sosial menurut Pierre Bourdieu tidaklah jauh berbeda dengan ahli-ahli sosiologi. Modal sosial diketahui di dalamnya terdapat sumber daya yang nantinya dimanfaatkan oleh aktor-aktor sebagai modal sosial atau pemanfaatan ekonomi. Hubungan di dalam modal sosial ini tentunya terjalin antara aktor. Ketika aktor memiliki modal sosial atau manfaat ekonomi yang besar, maka aktor tersebut dapat menguasai sumber daya yang ada dengan adanya jejaring antar aktor (Usman, 2018). Modal adalah sesuatu yang dimiliki seseorang serta memiliki manfaat. Diketahui dalam modal sosial tidak dapat dilepaskan dari modal ekonomi dan modal budaya yang mana jika seseorang memiliki modal yang berbeda maka mereka akan berada pada hierarki sosial yang berbeda juga namun mereka dapat melakukan mobilisasi tergantung dengan usahanya masing-masing (Bourdieu, 1980).

Modal sosial merupakan modal yang lebih menekankan pada modal yang dimiliki masyarakat sebagai hasil dari hubungan-hubungan sosial yang terjalin diantara semua anggota. Modal sosial memberikan landasan konstruksi tentang makna kepercayaan, kebersamaan, toleransi dan partisipasi yang erat hubungannya dengan strategi kelangsungan hidup (Solikatur & Juniarsih, 2018). Peneliti telah menemukan juga bahwa *kedua* hubungan antara individu dengan individu yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya dapat mengakibatkan terjalinnya sebuah jaringan. Penelitian ini Peneliti menemukan adanya jaringan dengan media, jaringan dengan basis massa yaitu pedagang, jaringan dengan organisasi sejenis seperti ICW. Tidak hanya jaringan yang terjalin, namun Peneliti juga menemukan adanya kepercayaan yang terjalin antara sesama aktivis dan kepercayaan pedagang terhadap aktivis. *Ketiga* Kepercayaan yang terjalin ini menghasilkan nilai-nilai sosial didalam kehidupan aktivis dan masyarakat tersebut. Nilai-nilai sosial yang menjadi bagian dari modal sosial gerakan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi yaitu, adanya nilai solidaritas antar sesama, nilai pantang menyerah, dan nilai partisipatif. antara masyarakat tersebut tidak berjarak dengan masyarakat karena masyarakat itu mereka sendiri.

Sebagaimana yang disampaikan di atas, ternyata tidak hanya itu yang menjadi modal sosial gerakan masyarakat sipil, namun juga adanya *keempat* isu lokalitas di masyarakat setempat. Isu lokalitas disini yaitu, keterkaitan setiap isu yang diangkat dengan kehidupan pedagang di Kota Bukittinggi. *Kelima* Organisasi masyarakat sipil yang ada di Kota Bukittinggi yang bersifat permanen dan kontemporer.

Adapun diketahui faktor lainnya yaitu, faktor budaya dengan kebiasaan masyarakat yang ada di Kota Bukittinggi untuk duduk di kedai kopi. Maka antara aktivis-aktivis ini dapat berinteraksi secara intensif antara satu dan lainnya. Interaksi yang terjalin tidak hanya antara aktivis dengan aktivis namun juga terjadi interaksi dengan pedagang pasar lainnya, ini berkontribusi sebagai pembentukan modal sosial gerakan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Peneliti di lapangan, dapat disimpulkan bahwasanya gerakan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi bertahan sampai sekarang ini. Tentunya hal ini didukung oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat sipil. Ditemukan adanya dinamika gerakan masyarakat sipil di Kota

Bukittinggi, *Pertama* adanya aktor yang mandiri dan otonom. *Kedua* jaringan yang dimiliki yaitu, jaringan dengan media, jaringan basis massa, jaringan dengan organisasi sejenis, seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan jaringan dengan pemerintahan. *Ketiga* legitimasi masyarakat (kepercayaan dan nilai-nilai seperti, nilai solidaritas, nilai pantang menyerah, nilai partisipatif yang terjalin antara individu dan individu, individu dan kelompok ataupun sebaliknya. *Keempat* isu lokalitas. *Kelima* organisasi masyarakat sipil. Disamping itu penelitian ini dapat menjadi acuan bagi daerah lain terkait modal sosial yang dimiliki masyarakat sipil sehingga bisa bertahan.

Penelitian ini masih terbatas pada penyelidikan tentang modal sosial yang dimiliki masyarakat sipil. Namun belum sampai mengungkapkan adanya modal lainnya, seperti modal budaya, modal ekonomi, dan modal simbolik. Berdasarkan temuan penelitian ditemukan modal sosial gerakan masyarakat sipil di Kota Bukittinggi. Atas dasar itu maka disarankan untuk penelitian berikutnya dapat menemukan bentuk modal lainnya yang dimiliki masyarakat dalam melakukan gerakan masyarakat sipil seperti, modal budaya, modal ekonomi dan simbolik.

Daftar Pustaka

- Amri, E., Putra, E. V., & Fernandes, R. (2016). Pola Hubungan Negara dan Civil Society. *Jurnal Politik Universitas Nasional*, 12(2), 1821–1828.
- Asquith, A. (2019). *Bourdieu and Social Capital*. in *Rebuilding Lives After Genocide*. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-14074-8>.
- Bourdieu, P. (1980). Le Capital Social: notes provisoires. *Sosial Science*, 2–3.
- Buyung, T. M., & Universitas Andalas. (2016). Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Sebagai Kekuatan Politik Dalam Proses Demokratisasi Di Indonesia (Studi Kasus: Gugatan terhadap Undang-Undang N0 17 Tahun 2013). Universitas Negeri Andalas.
- Faulks, K. (2018). *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Bandung: Nusa Media.
- Ginting, H. S. P. H. (2019). Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata : Analisis Habitus dan Modal dalam Arena Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS*, 13(1), 47–56.
- Herman, A. F. (2021). Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Terhadap Penolakan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Universitas Andalas.
- Hikam, M. A. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mukhsin, R., Mappigau, P., & Tenriawaru, A. N. (2017). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar. *Jurnal Analisis*, 6(2), 188–193.
- Nunug, G. (2017). Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Sebagai Kekuatan Politik Dalam Mengawal Kasus Korupsi Di Sumatera Barat. <http://scholar.unand.ac.id/25994/>
- Rex, S. T. D. T. (2021). Peran Civil Society Melalui Eksistensi lembaga Pemangku Adat Dalam Merespon Fungsi Pemerintahan di Kabupaten Kupang. *Jurnal Politicon*, 10(1), 65–76.
- Rinaldi, I., & Kompas.com. (2012). *Mantan Wali Kota Bukittinggi Divonis 4 Tahun Penjara*. kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2012/01/06/19333112/~Regional~Sumatera>
- Solikatun, & Juniarsih, N. (2018). Modal Sosial Sebagai Srategi Bertahan Hidup Masyarakat Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 7(2), 262–273.
- Suryanto, S. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Takwin, B. (2009). *Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat, Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial. (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu.* (dkk. (ed.). dalam Harker, Richard (ed.); II). Jakarta: Jalasutra.
- Usman, S. (2018). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusron. (2009). *Elite Lokal dan Civil Society* (1st ed.). Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.